

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diselenggarakannya otonomi daerah memberikan kesempatan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah-daerah akan lebih mandiri dalam membuka peluang memajukan daerah dengan membuka peluang identifikasi sumber-sumber pendapatan serta potensi-potensi yang di miliki secara efektif dan efisien. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional hendaknya diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Otonomi daerah juga akan mendorong daerah seperti kota dan kabupaten untuk membangun dan mengembangkan wilayah berdasar kondisi obyektif yang dimiliki daerah masing-masing, dimana pengembangan wilayah ini difungsikan sebagai pengintifikasi sumberdaya yang dimiliki juga merupakan tuntutan kebutuhan ruang yang diakibatkan oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta kegiatan fungsionalnya dan interaksi antara kegiatan tersebut.

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi sangat tergantung pada potensi sumberdaya yang ada pada wilayah beraneka ragam, sehingga perencanaan pembangunan yang dibuat harus berdasarkan pada kondisi objektif sesuai dengan spesifikasi, potensi sumber daya yang terdapat pada masing-masing wilayah.

Dalam rangka hubungan dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, maka untuk itu perlu diketahui seberapa jauh peran pemerintah dalam menunjukkan rencana strategisnya. Secara umum Kabupaten tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi warga Kabupaten itu sendiri, tetapi juga merupakan tempat segala kegiatan untuk memberikan daya dukung atau sumber daya manusia akan perkembangan daerah di sekitarnya.

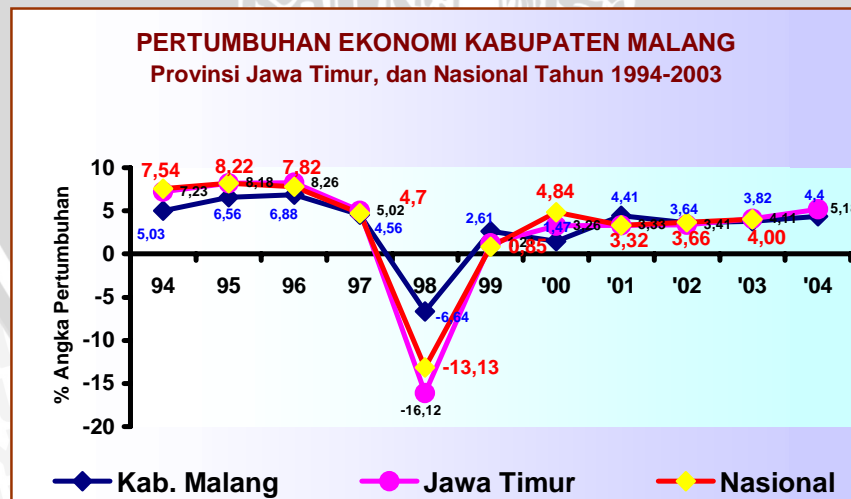
Dalam usaha untuk mengarahkan perkembangan kabupaten di perlukan pedoman yang mantap agar pembangunan lebih terarah terpadu dan lebih merata perkembangannya. Pembangunan pada wilayah Kabupaten harus didasarkan pada perencanaan yang disusun dan dibuat sesuai berdasarkan pada karakteristik potensi yang dimiliki oleh Kabupaten itu sendiri. Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 dijelaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi dilakukan dengan mendorong pertumbuhan usaha dan investasi, yang bertumpu pada sektor bidang andalan yaitu: pertanian pangan, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan dan jasa sebagai pengungkit dan pendorong serta memacu bidang potensi yaitu: kelautan, pertambangan, pariwisata dan air bersih.

Kabupaten Malang merupakan satu kabupaten yang tergolong memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang yang menduduki peringkat 6 dari 33 kabupaten/kota yang ada di propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Pasuruan. Cukup tingginya aktivitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari tingginya aktivitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sektor pertanian, kemudian

disusul oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan serta sektor jasa. Secara keseluruhan di Kabupaten Malang dari tahun 2000 sampai tahun 2004 peran rerata sektor primer sebesar 30,46%, sektor sekunder 18,50% dan sektor tersier 50,79%.

Meskipun aktivitas perekonomian di Kabupaten Malang cukup tinggi, namun selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami juga pasang surut. Kondisi pasang surut tersebut disebabkan oleh imbas dari kondisi makro ekonomi nasional yang cenderung memburuk terutama pada saat terjadi krisis moneter. Berikut ini adalah gambaran perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, dan Nasional selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yang terbagai pada empat kondisi yaitu: kondisi sebelum krisis, kondisi pada saat krisis, kondisi paska krisis, dan kondisi mulainya pelaksanaan otonomi daerah.

Gambar 1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Malang

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa sebelum krisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang cenderung konstan, namun setelah memasuki krisis

ekonomi pertumbuhannya mengalami penurunan, bahkan sampai – 6,64%, tapi penurunan tersebut merupakan penurunan terendah dibanding propinsi dan nasional. Setelah krisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan trend yang positif sampai pada saat sekarang, namun lebih lambat dibanding rerata Jawa Timur dan Nasional, hal ini disebabkan karena kontribusi sektor ekonomi Kabupaten Malang yang dominan adalah sektor primer yang umumnya menghasilkan nilai tambah sedikit atau dengan kata lain harga jualnya sangat rendah, dibanding produk sektor industri dan jasa yang merupakan sektor ekonomi dominan pada rerata Jawa Timur dan Nasional. Oleh karena itu sebaiknya kontribusi ekonomi sektor primer diarahkan bergeser pada sektor industri, dalam hal ini agroindustri dan industri pertambangan. Begitupun sektor perdagangan Kabupaten Malang lebih ditekankan untuk meningkatkan komoditas ekspor agar mampu meningkatkan nilai tambah yang merupakan faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi.

Untuk pembangunan di bidang industri kecil dan menengah dapat dilihat dari adanya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kabupaten Malang yaitu sektor industri kecil dan menengah menyumbang 14,8%. Jumlah perusahaan industri kecil pada bulan Juni tahun 2008 sebanyak 1.146 yang menampung tenaga kerja sebanyak 22.730 orang dengan nilai investasi sebesar Rp. 198.944.779. Untuk industri besar dan sedang pada bulan Juni sebanyak 234 buah yang menampung tenaga kerja sebanyak 71.185 orang dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.884.650.817. Sementara total industri di wilayah Kabupaten Malang bulan Juni 2008 sebanyak 1.380 unit usaha yang menampung tenaga kerja sebanyak 93.915 orang dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.083.595.595

Pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Malang ke depan menganut prinsip ekonomi kerakyatan yang adil dan berimbang bagi segenap pelaku dalam rangka memanfaatkan secara optimal potensi yang tersedia bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dimana sektor usaha dan investasi perlu dipacu untuk dapat segera bangkit.

Bertolak dari pemikiran di atas maka judul skripsi ini adalah Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi (Studi Sektor Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah potensi sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Malang ?
2. Apa peran pemerintah dalam mengembangkan sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Malang ?
3. Apakah faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengembangan sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengembangkan sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengembangan sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara praktis
 - a. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor usaha dan investasi di Kabupaten Malang.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pertumbuhan pembangunan ekonomi sektor usaha dan investasi di Kabupaten Malang.
2. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini bisa menambah khasanah bagi pengembangan Ilmu Administrasi, khususnya tentang pemerintahan daerah.
 - b. Hasil penelitian ini sebagai referensi teori untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Pembahasan

1. Bab I : PENDAHULUAN
Dalam Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.
2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Dalam Bab II ini diuraikan tentang teori-teori atau temuan ilmiah dari buku, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kajian tentang konsep Pemerintahan Daerah, pembangunan dan industri.
3. Bab III : METODE PENELITIAN
Dalam Bab III ini diuraikan mengenai langkah-langkah penelitian diawali dari : jenis penelitian, fokus penelitian, situs

atau lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data serta analisis dan interpretasi data.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini akan diuraikan tentang tentang kesimpulan yaitu temuan pokok penelitian sesuai dengan tujuan penelitian serta saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai rekomendasi pada penelitian selanjutnya.

